
PENGARUH DAU, PAD, DBH, UMR & ANGKATAN KERJA TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI JAWA TENGAH (2016-2021)

Afriyanti¹

1 Universitas Ahmad Dahlan; afriyanti1800010129@webmail.uad.ac.id

Abstrak: Belanja modal dalam anggaran perbelanjaan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik yang maksimal dan mendukung berjalanya proyek infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis regresi pada faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal di Jawa Tengah. Bentuk data dalam penelitian ini merupakan data panel dengan alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Dari ketiga *output* regresi, REM diterapkan sebagai model regresi yang paling relevan dengan karakteristik data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen pada model berpengaruh serentak dan signifikan pada belanja modal dengan koefisien determinasi sebesar 32%. Kemudian, uji parsial menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan, adapun UMR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Adapun PAD, DBH, dan Angkatan kerja tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada belanja modal. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan alat analisis lain dan observasi yang lebih banyak.

Keywords : Penerimaan Daerah, UMR, Angkatan Kerja, Belanja Modal, REM.

*Correspondence: Afriyanti
Email:
afriyanti1800010129@webmail.uad.ac.id

Received:
Accepted:
Published:



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Capital expenditure in regional budgeting plays a crucial role in creating optimal public services and supporting the implementation of infrastructure projects. This study aims to conduct regression analysis on the factors influencing capital expenditure in Central Java. Panel regression is used for analytical tool and using REM model for estimation. The results of the study indicate that all independent variables in the model collectively and significantly influence capital expenditure, with a coefficient of determination of 32%. Furthermore, partial tests show that General Allocation Fund has a positive and significant effect, while Minimum Wage has a negative and significant effect on capital expenditure. However, Regional Original Revenue, Revenue Sharing Fund, and Labor Force do not exhibit significant influence on capital expenditure. Further research is expected to employ alternative analytical tools and broader observations.

Keywords: Regional revenue, wages, labor force, capital expenditure, REM.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintah memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan adanya dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pemerintah daerah melalui APBD memberikan pos Belanja Modal sebagai anggaran yang digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya investasi. Investasi tersebut akan kembali (*return*) kepada perbaikan taraf hidup masyarakat. Maka dari itu, Belanja Modal memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat. Tanpa adanya Belanja Modal, maka mustahil pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat akan berjalan maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Salah satu kriteria paling penting bagi Pemerintah Daerah dalam mengurus daerahnya sendiri dengan maksimal adalah kemampuan finansial (Sukarniati dan Lubis, 2022).

Wewenang Pemerintah Daerah dalam mengatur anggaran perbelanjaan rumah tangganya sendiri merupakan implementasi dari diberlakukannya otonomi daerah. Menurut Nasir (2019)

pelaksanaan otonomi daerah yang sudah lebih dari satu dekade pelaksanaannya membuat tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang maksimal. Otonomi daerah mengharuskan daerah-daerah memiliki formulasi sendiri dalam merancang anggaran perbelanjaan mereka yang disesuaikan berdasarkan kebutuhannya dan urgensi daerah masing-masing. Atas dasar wewenang tersebut, suatu daerah juga memiliki hak dan wewenang dalam menggali potensi yang memungkinkan daerah tersebut memiliki pendapatan sendiri dan tidak terlalu bergantung terhadap transfer pusat. Meski suatu daerah tergolong mandiri, umumnya masih terdapat transfer pusat baik dari Dana Bagi Hasil maupun Dana Alokasi Umum. Hal tersebut untuk menyelaraskan program daerah dengan program nasional.

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah sentral perekonomian bagi nasional dengan kontribusi sebesar 12-15% dalam interval 2016-2024 (BPS, 2024). Ini menjadikan Provinsi Jawa Tengah menjadi nomor 4 provinsi yang paling berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Melihat fakta tersebut, maka penganggaran APBD oleh Provinsi Jawa Tengah mesti harus lebih teliti terutama untuk mempertahankan atau meningkatkan status tersebut. Belanja Modal menjadi sangat penting untuk menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam observasi data yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan anomali terkait realisasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016-2021. Terdapat daerah yang realisasinya hanya 39.40% namun disisi lain terdapat daerah yang realisasinya mencapai 251%. Artinya, realisasi Belanja Modal antar daerahnya ditemukan ketimpangan. Dalam jangka panjang, ini akan menyebabkan ketimpangan antar regional. Selain itu, pada interval tahun 2016-2021 terdapat resesi yang disebabkan oleh COVID-19. Pada saat itu, anggaran perbelanjaan daerah mengalami restrukturisasi dimana Belanja Modal diturunkan dengan sangat signifikan dan dananya diprioritaskan untuk aktivitas medis dan proteksi sosial. Ini sekaligus menjadi ketertarikan peneliti untuk mendalaminya lebih lanjut.

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016-2021. Beberapa variabel independen yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Umah Minimum Regional (UMR), dan Angkatan Kerja. Penelitian ini memodelkan determinan Belanja Modal melalui aspek penerimaan daerah dan aspek ketenagakerjaan. Aspek penerimaan daerah direpresentasikan melalui PAD, DAU, dan DBH. Adapun aspek ketenagakerjaan direpresentasikan melalui UMR dan Angkatan Kerja. Pemodelan ini artinya mengombinasikan faktor pemerintah dan faktor masyarakat.

Sejauh observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kesenjangan (*gap*) hasil penelitian antar peneliti terdahulu. Misalnya menurut Tunjungsari dan Khoirudin (2022) mengonfirmasi bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, namun yang berpengaruh positif dan signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah. Adapun menurut Pramudya dan Abdullah (2021) Pendapatan Asli Daerah justru memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Selanjutnya penelitian oleh Rustiana Marheni dan Eko Triyanto (2023) menghasilkan temuan bahwa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah. Keberagaman hasil penelitian menjadi salah satu latar belakang penelitian ini dilaksanakan, yakni untuk mengisi *gap* literatur yang ada.

METODE PENELITIAN

Dimensi data yang diamati pada penelitian ini merupakan *longitudinal* yang merupakan kombinasi antara *cross-sectional* dengan *time-series*. *Cross-sectional* dalam penelitian ini merupakan 35 Kabupaten & Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan *time-series* 2016-2021 (*YoY*). Dengan demikian, alat analisis yang paling relevan untuk digunakan adalah regresi data panel. Dalam proses pengolahannya, regresi panel menghasilkan tiga unit regresi yakni CEM, FEM, dan REM yang kemudian dipilih yang terbaik melalui uji spesifikasi model. Uji spesifikasi model terdiri atas uji chow dan uji hausman serta uji langrange multiple. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada gejala data apapun yang berpotensi mengganggu hasil penelitian sehingga diperlukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Berikut ini merupakan model penelitian menggunakan regresi data panel :

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 UMR_{it} + \beta_5 AK_{it} + e$$

Dengan keterangan sebagai berikut :

BM	; Belanja Modal
DAU	; Dana Alokasi Umum
PAD	; Pendapatan Asli Daerah
DBH	; Dana Bagi Hasil
e	; Koefisien Error
it	; Intersep ke t
β	; Koefisien Beta
α	; Konstanta

Setelah memenuhi persyaratan kaidah asumsi klasik, alur penelitian selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan menjawab apakah hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan hipotesis yang dibangun. Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen pada model berpengaruh serentak dan signifikan atau sebaliknya. Uji ini memiliki dasar keputusan apabila nilai probabilitas di bawah 0.05 maka keputusan menyatakan bahwa terdapat signifikansi serentak pada model. Kemudian uji parsial atau uji T juga memiliki dasar keputusan yang sama dimana variabel yang diuji memiliki pengaruh signifikan ketika nilai probabilitas menunjukkan kurang dari 0.05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Rerata	Minimal	Maksimal	Std. Deviasi
Belanja Modal (%)	210	100.13	39.64	251.81	25.54
DAU (%)	175	89.16	0	100	37.28
PAD (%)	210	117.68	72.24	180.18	20.05
DBH (%)	175	69.81	0	100.67	34.98
UMR (IDR)	209	1.750.259	1.265.000	2.810.025	285.881
Angkatan Kerja (Jiwa)	175	439.885	62.775	1.034.794	278.631

Sumber : Data diolah, 2024.

Belanja modal sebagai variabel dependen memiliki rata-rata melebihi 100% yang artinya mayoritas Kabupaten & Kota di Jawa Tengah telah maksimal dalam menyerap seluruh anggaran belanja modal karena telah melebihi 100%. Namun sepanjang observasi penelitian ini, terdapat Kabupaten yang bahkan hanya merealisasikan belanja modal sebesar 39.64% atau dalam artian sangat jauh dari target 100%. Kabupaten tersebut ialah Kabupaten Kendal tahun 2020. Pada saat

tahun 2020, banyak anggaran perbelanjaan dirombak untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan COVID-19 sehingga proporsi dana investasi (belanja modal) dikurangi. Kemudian realisasi paling tinggi sebesar 251.81% atau lebih dari dua kali lipat target. Ini terjadi di Kab. Pemalang tahun 2016. Secara umum, kontraksi belanja modal sebagian besar terjadi pada tahun 2020 karena penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19. Dari segi sumber penerimaan daerah hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki rerata realisasi lebih dari 100%, namun Dana Alokasi Umum yang merupakan transfer pusat hampir 100% yakni 89.16%. Dari segi sektor ketenagakerjaan, rerata upah minimum hanya tercatat sebesar IDR. 1.750.259. Ini masih sangat jauh perbedaannya dengan Jawa Barat yang telah mencapai reratanya di level 4 juta-an. Ini artinya Jawa Tengah perlu membenarkan pada standar minimum upah yang diberlakukan untuk tenaga kerja. Selanjutnya, angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah memiliki rerata 439.885 jiwa dengan nilai tertinggi 1.034.794 jiwa dan nilai terendah 62.775 jiwa. Angkatan-angkatan kerja terbanyak adalah dari kota terpadat atau Ibu Kota Jawa Tengah, yakni Semarang yang menjadi pusat ekonomi.

Uji Spesifikasi Model Regresi

Tabel 2. Uji Spesifikasi Model

Uji Model Terbaik			
Uji	P-Value	Hasil	
Uji CHOW	0.004	FEM	
Uji Hausman	0.075	REM	
Uji LM	0.000	REM	
Hasil Regresi REM			
Variabel	Koefisien	T _{hitung}	T _{tabel}
DAU	0.09	2.12	1.97
PAD	0.10	1.22	1.97
DBH	-0.26	-1.89	1.97
UMR	-0.000025	-2.46	1.97
AK	0.0000023	0.24	1.97
CONS	141.9117	7.62	1.97
DAU	0.09	2.12	1.97
R-Squared		0.32	
Prob. F		0.000	

Sumber : Data diolah, 2024

Pada bagian uji spesifikasi model atau uji model terbaik, menunjukkan bahwa REM merupakan model terbaik atau model yang relevan digunakan sesuai dengan karakteristik data. Dengan terpilihnya REM sebagai model terbaik, maka menunjukkan efek yang bersifat acak di masing-masing pengamatan. Merujuk pada nilai koefisien dan konstanta pada tabel 2, maka dapat dituliskan model penelitian ini sebagai berikut :

$$BM_{it} = 141.91 + 0.09dau_{it} + 0.10PAD_{it} - 0.26DBH_{it} - 0.000025UMR_{it} + 0.0000023AK_{it} + e$$

Selanjutnya nilai probabilitas F menunjukkan 0.000 atau kurang dari 0.05 yang menandakan adanya pengaruh signifikan dan serentak antara seluruh variabel independen pada model terhadap belanja modal. Adapun kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 32% dengan 68% lainnya dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. Dengan membandingkan nilai T_{hitung} dan T_{tabel} serta mengamati parameter pada nilai koefisien, maka dapat disimpulkan bahwasanya DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dan UMR berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap belanja modal. Adapun PAD, DBH dan Angkatan Kerja dikonfirmasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut dikarenakan secara statistik memiliki nilai T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} .

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	P-Value	Rerata VIF
Multikolinieritas		4.73
Heterokedastisitas	0.84	

Sumber : Data diolah, 2024.

Merujuk pada tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa uji multikolinieritas menunjukkan rerata VIF kurang 10 yang menandakan keterikatan antar variabel independen pada model tergolong rendah sehingga tidak mengganggu korelasinya dengan variabel dependen. Adapun nilai probabilitas heterokedastisitas menunjukkan lebih dari 0.05 yang menandakan varian residu bersifat konstan atau homokedastisitas sehingga dikonfirmasi tidak memiliki gejala heterokedastisitas yang menyebabkan penelitian menjadi bias.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya adalah pada saat Pemerintah Pusat meningkatkan transfer atas Dana Alokasi Umum kepada Pemerintah Daerah maka realiasi belanja modal daerah tersebut akan meningkat juga. Dimana setiap peningkatan DAU sebesar 1% maka belanja modal diprediksi akan meningkat sebesar 20.12%. Proporsi yang cukup tinggi tersebut menunjukkan vitalnya Dana Alokasi Umum bagi penganggaran belanja modal di suatu daerah. Bahkan proporsi ini lebih besar daripada proporsi Dana Alokasi Khusus yang hanya akan meningkat 0.55% per peningkatan 1% dari Dana Alokasi Khusus itu sendiri.

Temuan penelitian terdahulu yang memperkuat pada penelitian ini adalah (Yuliantoni & Arza, 2021) yang mengonfirmasi bahwasanya Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Menurutnya, semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang ditransfer ke daerah, maka kemampuan daerah dalam membelanjakan anggaran tersebut untuk pagu modal menjadi lebih besar. Sehingga, peningkatan Dana Alokasi Umum tentu akan direspon oleh peningkatan realisasi belanja modal. Kemudian (Dini et al., 2021) juga menguatkan hasil temuan pada penelitian ini dimana DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam analisisnya menyebut bahwa masih banyak Pemerintah Daerah yang bergantung transfer anggaran dari Pemerintah Pusat salah satunya Dana Alokasi Umum. Hal ini ditimbulkan karena Pendapatan Asli Daerah belum mampu membiayai seluruh kebutuhan modal. Sehingga pada saat Dana Alokasi Umum dihentikan atau dikurangi, maka beresiko pada turunya realisasi Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan pembangunan, termasuk belanja modal. Sebagai transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, DAU memberikan fleksibilitas keuangan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang dianggap prioritas, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rustiana Marheni & Eko Triyanto, 2023). Kemudian, DAU dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan di seluruh Indonesia.

Dengan memberikan dukungan finansial kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada wilayah-wilayah yang lebih makmur, tetapi juga mencakup daerah-daerah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya sendiri. Hal ini dapat membantu mengurangi disparitas pembangunan antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Anggraeni et al., 2022).

Namun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa efektivitas penggunaan DAU dalam meningkatkan belanja modal akan sangat bergantung pada kapasitas administrasi dan manajerial pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa DAU digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya adalah apabila tingkat Upah Minimum Regional meningkat, maka realisasi Belanja Modal akan menurun dan berlaku sebaliknya. Dimana setiap peningkatan UMR sebesar 1% maka realisasi Belanja Modal diprediksi akan menurun sebesar 0.00002%. Asosisasi negatif antara UMR dengan Belanja Modal ini membawa perspektif baru dimana peningkatan UMR ini dapat memberikan beban pada Belanja Modal. Penurunan UMR mungkin meniadakan beban pada Belanja Modal namun tenaga kerja yang akan terdampak dalam hal ini.

Dalam konteks hubungan antara Upah Minimum Regional dengan Belanja Modal, maka apabila suatu wilayah atau daerah tertentu mengalami peningkatan tingkat upah maka Pemerintah memiliki beban operasional tambahan atas peningkatan upah tersebut. Belanja Modal memang tidak digunakan untuk membayar upah karena hal tersebut terdapat pagunya sendiri yakni Belanja Pegawai. Namun apabila Pemerintah tidak memiliki alokasi yang cukup untuk memberikan upah kepada pegawai sebagai respons atas peningkatan UMR, maka Belanja Modal bisa berkontraksi untuk menutupi kekurangan atas biaya peningkatan upah.

Signifikansi statistik dari pengaruh negatif ini menegaskan bahwa dampak UMR terhadap belanja modal bukanlah sekadar kejadian acak. Ini menunjukkan bahwa kenaikan UMR secara konsisten menggerus kemampuan pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan proyek-proyek lain yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis lebih lanjut, penting untuk memperhatikan konteks kebijakan dan ekonomi daerah. Misalnya, di daerah di mana UMR mungkin naik secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang sebanding, pemerintah daerah mungkin terpaksa mengalihkan sumber daya dari belanja modal ke sektor-sektor lain untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai.

Selain itu, temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan anggaran yang cermat dan strategis di tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan secara matang implikasi kenaikan UMR terhadap belanja modal dan memastikan bahwa alokasi anggaran tetap seimbang antara kebutuhan operasional dan pembangunan jangka panjang. Dalam keseluruhan, analisis terhadap temuan bahwa UMR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal dalam APBD menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola anggaran di tengah perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan. Dengan memahami dinamika ini, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa poin penting yakni penelitian membuktikan bahwa realisasi belanja dipengaruhi oleh DAU, PAD, DBH, UMR dan Angkatan Kerja secara serentak dengan kemampuan penjelasan sebesar 32%. Kemudian variabel yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial meliputi DAU dan UMR. Sebaliknya, variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan meliputi DBH, PAD, dan Angkatan Kerja. Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa penerimaan daerah memiliki peranan yang sangat vital sehingga pembelanjanya harus efektif dan efisien serta berorientasi pada *outcome* jauh lebih baik daripada berorientasi kuantitas realisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperlengkap dengan membandingkan beragam model atau alat analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, I., Rachman, D., & Karlimat, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2010-2019. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(1), 27–37. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Dini, S., Sigiro, F. B., Saribu, D. Y. B. D., & Hutagalung, J. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(2), 1118–1137. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1254>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45.
- Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal. *Inovasi*, 17(4), 653–660. <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10041>
- Rustiana Marheni, & Eko Triyanto. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 4223–4240. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i11.6130>
- Sukarniati, L., & Lubis, F. R. A. (2022). Determinants of Local Original Income The Era of Special Autonomy for the Government of Aceh Province. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 93–107.
- Tunjungsari, D., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 124–134.
- Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170–187. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.338>
-